

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang ini, dengan segala macam kronik kehidupannya, tentu membutuhkan aspek-aspek yang dapat saling mempercayainya. Salah satu unsur dalam aspek kepercayaan adalah adanya akuntabilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Konsep akuntabilitas merupakan turunan dari konsep etika yang dianggap lebih dekat dengan hal-hal administrasi kepublikan (pemerintahan), namun demikian dalam praktiknya persoalan yang dapat dipertanggungjawabkan tidaklah hanya menjadi urusan pemerintahan namun hal ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga-lembaga atau individu-individu yang memang bekerja dalam sektor-sektor kepublikan baik dalam kelembagaan pemerintahan maupun nonpemerintahan. (Farhan, 2019)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam suatu laporan Keuangan Pemerintah. (Indonesia, 2010)

Komponen penting dalam Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu adalah neraca. Salah satu pos/akun penting dalam neraca adalah aset/aktiva karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah dimasa depan. Jika aset tetap tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK, karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Aset tetap tersebut harus dicatat sesuai Standar Akuntansi Yang berlaku yaitu harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tepatnya PSAP Nomor 07 Mengenai Aset tetap. Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua sebanyak 14 Kabupaten dimaksud yakni, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak, Mappi, Sarmi, Boven Digoel, Tolikara, Mamberamo Raya,

Mamberamo Tengah, Biak Numfor dan Waropen. Lembaga ini menilai pengelolaan aset persediaan 14 pemerintah Kabupaten di wilayah Papua masih belum tertib. Dimana ada pemda yang tahu jumlah aset, namun tak bisa menunjukkan lokasi keberadaannya. Anehnya lagi ada aset Pemda yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang ada juga Kepala Dinas yang berpindah ke Kabupaten lain tapi mobil dinas juga ikut pindah. Belum lagi, ada ASN yang pensiun lalu mobil dinas juga ikut pensiun. Sehingga BPK berharap pengelolaan aset seperti ini diperbaiki karena mempengaruhi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemda setempat.

Dalam PSAP No 7 Paragraf 10 Aset tetap peralatan dan mesin itu sendiri “ mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Berdasarkan LKPD tahun anggaran 2018 yang disajikan pemerintah provinsi papua, jumlah total aset tetap yang dimiliki mencapai RP15.960.978.907.036,20 dan aset tetap peralatan dan mesin mencapai 10,21% dari total aset tetap atau dengan kata lain RP1.630.344.928.205,86. Melihat data yang cukup material ini maka pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah daerah Provinsi papua.

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi Papua tahun 2018 terdapat peralatan dan mesin yang masih tidak didukung informasi yang lengkap sebesar 21% atau senilai RP341.914.286.303,00 sehingga masih di ragukan keberadaannya. Temuan dari BPK tersebut mengenai penilaian yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan terdapat nilai aset tetap yang tidak didukung informasi yang lengkap sehingga diragukan keberadaannya. Serta temuan-temuan tambahan mengenai penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin. Masalah- masalah tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah provinsi papua. Hal ini sejalan dengan pengungkapan laporan keuangan harus berisi mengenai informasi bagi setiap jenis aset yang lengkap diantaranya adalah

pengungkapan perubahan nilai aset tetap secara detail, seperti halnya dalam pembelian aset tetap.

Agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun bertujuan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode laporan. laporan keuangan terutama dapat memberikan informasi mengenai nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, juga bermanfaat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.(Geometry & Analysis, 2016).

Untuk dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik. pemerintah terutama dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (ODP) memerlukan management pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Standard akuntansi pemerintah (SAP) ditetapkan berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Standard ini disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian tersebut dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Jika dalam waktu berjalan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, maka akan sangat memungkinkan memiliki pengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan yang tidak efisien, efektif dan transparansi. (Amanda, Putri, & Sari, 2016)

Berdasarkan latar belakang fenomena yang terjadi maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYAJIAN DAN**

PENGUNGKAPAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Fitriana Wati (2011). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi dan waktu yang berbeda, dimana penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010 sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan pada Pemerintah daerah Provinsi Papua tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu “ Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua periode 2014-2018 sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua periode 2014-2018 sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 ?”

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi pemerintahan mengenai penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin disektor pemerintahan yang sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan terbaru yaitu SAP PP 71/2010 berbasis akrual. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi civitas akademika yang akan meneliti dengan pokok bahasan sejenis.

2. Manfaat empiris

Secara empiris, hasil penelitian ini bermanfaat dapat :

- a) Membantu Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu SAP PP No. 71 Tahun

2010 khususnya mengenai aset tetap peralatan dan mesin, sehingga tercipta laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan reliabel.

- b) Memberikan bukti empiris mengenai fenomena/kondisi yang terjadi di Pemerintah Daerah Provinsi Papua terkait penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin dengan penerapan SAP PP 71/2010, khususnya pada Laporan Keuangan periode 2014-2018.
- c) Dari bukti empiris tersebut diharapkan dapat memacu motivasi pihak akademisi untuk lebih aktif memberikan informasi dan pelatihan kepada pihak pemerintahan terkait penyusunan laporan keuangan sesuai standard akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan menjadi lebih wajar, relevan, dan reliabel.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai isi skripsi, maka peneliti menyusun penulisan ini dengan membagi menjadi 5 (lima) bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi latar belakang permasalahan yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Papua terkait Penyajian dan pengungkapan Aset tetap Peralatan dan mesin, rumusan masalah terkait latar belakang yang ada, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

BAB ini menguraikan tentang teori/konsep mengenai penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin serta teori pendukung lainnya yang diambil dari berbagai literatur teori akuntabilitas, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap peralatan dan mesin berbasis akrual, akuntansi penyusutan berbasis akrual dan peraturan lain yang terkait. Bab ini juga mengemukakan penelitian sebelumnya dan model penulisan.

BAB III Metode Penelitian

BAB ini menguraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis data berupa data kuantitatif dan kualitatif Sumber data dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk LKPD Provinsi Papua tahun 2014-2018, yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LA), dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk). Sedangkan data kualitatif yang digunakan berupa Data gambaran umum, kebijakan akuntansi, dan peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta literatur-literatur yang mendukung. Menurut sumbernya data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu merupakan data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data internal instansi terkait, internet, data penelitian sebelumnya, literatur-literatur yang mendukung.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subjek dan objek penelitian yang meliputi aktivitas organisasi, struktur organisasi, kebijakan akuntansi terutama yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin pada Pemerintah Provinsi Papua.

BAB V

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Daerah Provinsi Papua.